

Volume 3, Nomor 1, Januari - Juni 2024 e-ISSN: 2987-5749, p-ISSN: 2987-5757 **DOI:** https://doi.org/10.31330/repo.v3i1.61 **Journal of Religious Policy,** 3(1), 66–90

KOSMOPOLITANISME ISLAM: GAGASAN NURCHOLISH MADJID DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN KEAGAMAAN DI ERA GLOBALISASI

ISLAMIC COSMOPOLITANISM: THE VISION OF NURCHOLISH MADJID AND ITS IMPLICATIONS FOR RELIGIOUS POLICY IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Hero Gefthi Firnando

STIE GICI Business School, Indonesia Jl. Raya Citayam, Cipayung, Depok, Jawa Barat-Indonesia herogefthigicibs@gmail.com

Artikel diterima: 19 Maret 2024, diseleksi: 05 Juni 2024, disetujui: 10 Juni 2024



Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kosmopolitanisme Islam dari Nurcholish Madjid dan implikasinya terhadap kebijakan agama kontemporer dalam konteks globalisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis tulisan-tulisan Madjid untuk menggali pandangannya tentang inklusivitas, keterlibatan antaragama, dan integrasi prinsip-prinsip Islam dengan norma-norma global. Analisis isi yang rinci mengidentifikasi tema-tema inti dalam visi Madjid untuk mendorong toleransi, pemahaman, dan kesatuan di antara komunitas agama yang beragam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep Madjid dapat secara signifikan mempengaruhi kebijakan agama untuk meningkatkan kohesi sosial. Pembahasan selanjutnya mencakup studi kasus yang menggambarkan penerapan praktis kosmopolitanisme Islam. Penelitian ini diakhiri dengan menyoroti potensi transformatif dari ide-ide Madjid untuk kebijakan agama global dan menyarankan jalan untuk penelitian masa depan tentang implementasi praktisnya.

Kata kunci: Kosmopolitanisme Islam; Nurcholish Madjid; Kebijakan Keagamaan; Globalisasi; Dialog Antaragama.

Abstract

The research aims to explore Nurcholish Madjid's concept of Islamic cosmopolitanism and its implications for contemporary religious policies in the context of globalization. Using a qualitative approach, the study analyzes Madjid's writings to extract insights into his views on inclusivity, interfaith engagement, and the integration of Islamic principles with global norms. A detailed content analysis identifies core themes in Madjid's vision of fostering tolerance, understanding, and unity among diverse religious communities. The findings suggest that Madjid's concept can significantly influence religious policies to enhance social cohesion. The discussion includes case studies illustrating the practical application of Islamic cosmopolitanism. The research concludes by highlighting the transformative potential of Madjid's ideas for global religious policies and suggests avenues for future research on their practical implementation.

Keywords: Islamic Cosmopolitanism; Nurcholish Madjid; Religious Policy; Globalization; Interfaith Dialogue.

PENDAHULUAN

Era perkembangan globalisasi terus maju, masyarakat dihadapkan pada tantangan kompleks yang melibatkan perubahan dinamis dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi (Hermawanto & Anggraini, 2020). Dalam konteks ini, terjadi perkembangan pemikiran dalam Islam yang berupaya memeluk keberagaman dan mengedepankan nilai-nilai universalitas. Pandangan baru ini tercermin dalam konsep kosmopolitanisme Islam, yang menjadi sorotan melalui karya dan pemikiran Nurcholish Madjid, seorang intelektual Muslim terkemuka.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memahami secara mendalam konsep kosmopolitanisme Islam yang diperjuangkan oleh Nurcholish Madjid, sambil menganalisis dampaknya terhadap kebijakan keagamaan di tengah kerumitan dan dinamika era globalisasi.

Konsep kosmopolitanisme Islam menurut Nurcholish Madjid, terdapat upaya untuk mengatasi ketegangan antara nilai-nilai lokal dan global (Madjid, 1992a). Madjid menyoroti pentingnya memelihara akar tradisi Islam sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global. Pemikirannya menekankan bahwa Islam memiliki potensi sebagai kekuatan penyatuan, tanpa menimbulkan perpecahan, dalam menghadapi kerumitan dunia modern yang terus berubah.

Dampak pemikiran Madjid terhadap kebijakan keagamaan terlihat dalam upaya untuk mendorong inklusivitas dan responsivitas terhadap dinamika global. Kosmopolitanisme Islam yang digagas oleh Madjid menekankan toleransi, dialog antarbudaya, dan pengakuan terhadap keberagaman. Oleh karena itu, kebijakan keagamaan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai

tersebut, memberikan ruang bagi partisipasi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan keyakinan atau identitas agama.

Pada konteks era globalisasi, dimana perubahan terjadi dengan cepat, kebijakan keagamaan yang responsif menjadi sangat penting. Konsep kosmopolitanisme Islam memberikan pandangan bahwa Islam dapat bersinergi dengan nilai-nilai universal untuk menciptakan kehidupan beragama yang seimbang dan harmonis. Oleh karena itu, kebijakan keagamaan harus bersifat fleksibel dan mampu mengakomodasi keberagaman, sambil menjaga nilai-nilai fundamental ajaran Islam.

Mengejar tujuan inklusivitas dan responsivitas memerlukan pemahaman bahwa kosmopolitanisme Islam bukanlah mengabaikan identitas lokal atau agama, melainkan sebuah harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan tuntutan dunia global. Kebijakan keagamaan yang muncul dari konsep ini harus dapat membangun jembatan antara tradisi dan modernitas, serta antara keberagaman dan kesatuan.

Merumuskan kebijakan keagamaan memerlukan keterlibatan tokoh-tokoh agama dan intelektual yang memahami konsep kosmopolitanisme Islam. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui dialog terbuka dan kolaborasi antar berbagai pihak, yang menjadi kunci merumuskan kebijakan yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai universal, tetapi juga mempertimbangkan konteks lokal yang kaya akan keberagaman..

Secara menyeluruh, pemikiran Nurcholish Madjid tentang kosmopolitanisme Islam memberikan sumbangan yang berharga dalam menghadapi tantangan globalisasi (Nurcholis, 1995). Konsep ini tidak hanya merangkul keberagaman, tetapi juga menawarkan perspektif yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan dunia global. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini dalam kebijakan keagamaan, masyarakat dapat membangun fondasi yang inklusif dan responsif terhadap dinamika zaman, sambil tetap memelihara identitas agama dan terbuka terhadap keanekaragaman manusia.

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang kosmopolitanisme Islam, dengan merinci argumennya seperti yang terdokumentasi dalam karya-karyanya seperti "Islam: Doktrin, dan Peradaban" dan "Islam Agama Peradaban". Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi konsep kosmopolitanisme dalam konteks globalisasi, mengambil perspektif keagamaan dan interkultural.

Dalam penelitian ini beberapa jurnal memberikan wawasan mendalam terkait pemikiran Nurcholish Madjid dan relevansinya dalam konteks global.

Sebuah artikel berjudul "Islam, Cultural Hybridity and Cosmopolitanism: New Muslim Intellectuals on Globalization" (Kersten, 2009), dalam esai ini mengeksplorasi pandangan Muslim terhadap fenomena globalisasi yang berbeda dari teori benturan peradaban Huntington atau narasi Jihad vs. McWorld dari Barber. Intelektual muslim baru, yang menggabungkan warisan Islam dan pengetahuan akademis barat, menunjukkan hibriditas budaya, menciptakan sikap kosmopolitan yang melampaui narasi biner. Fenomena intelektualisme ini dapat ditemukan secara global, dengan fokus khusus pada sarjana Indonesia.

Selanjutnya, "Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia" (Barton et al., 2021) Artikel ini mengulas persaingan ide-ide agama Islam dalam politik dan masyarakat Indonesia pada abad ke-20, dengan fokus pada tiga aliran intelektual Islam utama: Modernis, Tradisionalis, dan neo-Modernis. Menyoroti peran kunci Islam neo-Modernis salah satunya merinci perbandingan gagasan Nurcholish Madjid dengan pandangan lain dalam dunia modern.

Sebagai tambahan, "Fiqh Pluralism: Comprehensive Analysis of Nurkholish Madjid Ideas Regarding Hermeneutics" (Ridwan, 2020) dalam artikel ini Cak Nur, atau Nurcholish Madjid, mengembangkan hermeneutika inklusif yang menjadi dasar unik bagi gagasan pluralisme dalam pemikiran Islam. Ia berhasil melampaui batas normativitas, membuka dialog antarbudaya, dan menyumbang pada wacana universal mengenai agama dan budaya.

Dengan merujuk pada jurnal-jurnal tersebut, penelitian ini membedakan diri dengan menyoroti aspek-aspek unik dan kontekstual dari gagasan Nurcholish Madjid tentang kosmopolitanisme Islam serta mengarahkan perhatian pada implikasinya bagi kebijakan keagamaan di era globalisasi. Integrasi temuan dari jurnal-jurnal ini akan memberikan dasar yang kuat untuk memahami kontribusi Madjid dalam menghadapi kompleksitas globalisasi dari sudut pandang keagamaan dan praktik kebijakan.

Fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep kosmopolitanisme Islam menurut Nurcholish Madjid, mengeksplorasi dampak pemikirannya terhadap kebijakan keagamaan di tengah era globalisasi, dan bagaimana konsep ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan keagamaan yang responsif dan inklusif. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis isi. Pendekatan ini memfasilitasi pengumpulan dan analisis data yang komprehensif, dengan porsi penelitian yang difokuskan pada

karya-karya Nurcholish Madjid dan literatur terkait, serta evaluasi kebijakan keagamaan dalam konteks globalisasi.

Hasil dari penelitian ini ingin kontribusi signifikan pada pengembangan paradigma kebijakan keagamaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan kompleks yang muncul dalam konteks globalisasi. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan mencerminkan visi kosmopolitanisme Islam yang diusung Nurcholish Madjid, membantu masyarakat menghadapi dinamika global dengan pendekatan yang lebih holistik dan terbuka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, diawali dengan tinjauan literatur pemikiran Nurcholish Madjid tentang kosmopolitanisme Islam dan literatur terkait teori agama, globalisasi, dan topik terkait. Penelitian dilanjutkan dengan analisis filosofis dan teologis untuk memahami landasan pemikiran Madjid dan implikasinya terhadap pemahaman agama dan identitas umat Islam di era globalisasi (Adlini et al., 2022).

Selanjutnya, analisis konteks sosial-politik dilakukan untuk mengeksplorasi dampak globalisasi terhadap dinamika sosial dan keagamaan serta bagaimana pengaruh tersebut terhadap praktik keagamaan (Rofiah, 2022). Dengan menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji berbagai penafsiran kosmopolitanisme Islam dari berbagai tradisi agama dan budaya serta menganalisis implikasi perbedaan tersebut terhadap kebijakan agama di era globalisasi.

Oleh karena itu, penelitian ini mencakup kajian kebijakan untuk mengevaluasi sejauh mana gagasan kosmopolitanisme Islam tercermin dalam kebijakan keagamaan yang ada. Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi kebijakan akan diberikan. Metodologi ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman komprehensif tentang kompleksitas kosmopolitanisme Islam dan potensinya dalam membentuk kebijakan agama dalam konteks global yang terus berkembang.

PEMBAHASAN

Kontribusi Nurcholish Madjid terhadap Pemikiran Kosmopolitanisme Islam

Nurcholish Madjid, sering kali dikenal sebagai Cak Nur, adalah salah seorang intelektual Muslim terkemuka di Indonesia yang pemikirannya

telah memberikan pengaruh besar sejak era 1970-an. Lahir pada tahun 1939, Cak Nur meniti karier intelektualnya dengan keyakinan bahwa Islam harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman (Majid, 2008). Pemikiran-pemikirannya yang mencakup tiga tema utama—Islam, Keindonesiaan, dan Kemodernan—telah memberikan landasan baru bagi wacana keislaman di Indonesia, yang berusaha menjembatani antara tradisi dan modernitas.

Salah satu kontribusi terbesar Cak Nur adalah kritik dan dekonstruksi terhadap pemikiran-pemikiran Islam yang dianggap telah mengalami fosilisasi. Ia melihat bahwa banyak ajaran dan interpretasi Islam yang menjadi kaku dan tidak relevan lagi dalam menghadapi dinamika kehidupan modern (Assyaukanie et al., 2024). Dengan berani, Cak Nur mengajak umat Islam untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan agar sesuai dengan konteks zaman. Pemikiran ini, meskipun kontroversial, bertujuan untuk membebaskan Islam dari kungkungan pemikiran yang stagnan dan membangkitkan kembali semangat ijtihad yang dinamis dan kreatif (Qomar, 2021).

Lebih jauh lagi, Cak Nur juga menyoroti pentingnya keindonesiaan dalam konteks keislaman. Baginya, menjadi Muslim yang baik tidak berarti harus menanggalkan identitas kebangsaan. Sebaliknya, ia percaya bahwa Islam harus diintegrasikan dengan budaya lokal untuk menciptakan harmoni yang lebih baik (Putri, 2019). Dalam pandangannya, nilai-nilai Islam universal dapat hidup berdampingan dengan keunikan budaya Indonesia, sehingga tercipta suatu bentuk Islam yang inklusif dan adaptif terhadap kearifan lokal (Hidayatullah et al., 2022). Ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar negara Indonesia.

Pemikiran tentang kemodernan juga menjadi bagian integral dari kontribusi intelektual Cak Nur. Ia menekankan bahwa modernitas tidak harus ditolak mentah-mentah oleh umat Islam. Sebaliknya, ia mendorong dialog konstruktif antara Islam dan modernitas untuk mencari solusi atas tantangan-tantangan zaman. Dalam konteks ini, Cak Nur mempromosikan pendidikan sebagai kunci untuk kemajuan umat. Dengan mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi, ia percaya bahwa umat Islam dapat berkontribusi lebih besar dalam peradaban global.

Cak Nur juga mengadvokasi pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia dalam konteks Islam. Ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan sebenarnya sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Melalui pandangan ini, ia berusaha membangun jembatan antara nilai-

nilai Islam dan prinsip-prinsip modern yang universal, mengajak umat Islam untuk tidak hanya menjadi penerima pasif tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam proses demokratisasi.

Warisan intelektual Nurcholish Madjid terus hidup dan berkembang melalui berbagai karya tulis dan pemikiran yang masih relevan hingga saat ini. Pemikirannya telah membuka jalan bagi diskusi yang lebih luas tentang bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan tantangan-tantangan kontemporer tanpa kehilangan esensi spiritual dan moralnya. Dengan demikian, Cak Nur tidak hanya menjadi pionir dalam pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, tetapi juga sebagai teladan bagi generasi intelektual Muslim selanjutnya dalam mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas.

Salah satu pemikiran paling kontroversial dan memicu banyak perdebatan adalah ketika Nurcholish Madjid mendekonstruksi eksklusivisme dalam Islam dan mengajukan inklusivisme sebagai alternatif (Wijaya, 2019). Langkah ini jelas bertentangan dengan pemahaman mainstream pada zamannya. Sebagai seorang cendekiawan neomodernis, Madjid mengembangkan argumen inklusivisme dengan memanfaatkan pendekatan dan metodologi modern tanpa mengabaikan argumen-argumen doktrinal Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama klasik.

Madjid menekankan bahwa eksklusivisme menghambat dialog dan kohesi sosial, sehingga ia mendorong umat Islam untuk lebih inklusif dalam memandang keberagaman (Suparjo et al., 2022). Dalam mengembangkan pemikiran ini, ia menggunakan metode yang modern dan analitis, tetapi tetap berakar pada teks-teks suci Islam dan tradisi ulama terdahulu (Dewi, 2018). Pendekatan ini memungkinkan dialog yang lebih luas dan penerimaan terhadap perbedaan, yang menurutnya sangat penting dalam konteks masyarakat yang semakin plural.

Dengan pendekatan neomodernisnya, Madjid berhasil mengajak umat Islam untuk berpikir lebih terbuka dan inklusif, tanpa meninggalkan ajaran-ajaran dasar Islam (Muhammedi, 2017). Ia menunjukkan bahwa inklusivisme bukanlah bentuk kompromi terhadap keyakinan, melainkan cara untuk memperkaya pemahaman dan praktik keislaman dalam konteks dunia yang terus berubah. Inisiatif ini menciptakan banyak diskusi dan mengubah cara pandang banyak orang tentang hubungan antara Islam dan modernitas, meskipun awalnya mendapat banyak resistensi (Fihrisi, 2014).

Meskipun pemikirannya sering kali menjadi subjek kontroversi, Nurcholish Madjid tetap diakui sebagai salah satu intelektual paling berpengaruh dalam dinamika pemikiran Indonesia. Sejak awal, Madjid berani mendekonstruksi eksklusivisme dalam Islam dan mengusulkan inklusivisme sebagai alternatif yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Langkah ini memicu banyak perdebatan, namun juga membuka ruang bagi pemikiran yang lebih progresif dan adaptif dalam Islam.

Madjid terus mengembangkan gagasannya melalui pendekatan inklusivisme, yang mendorong pemahaman yang lebih luas dan terbuka terhadap Islam. Dengan inklusivisme, ia mengajak umat Islam untuk tidak hanya berfokus pada dogma dan ritual semata, tetapi juga melihat nilai-nilai universal Islam yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan penghargaan terhadap keberagaman, baik dalam lingkup internal umat Islam maupun dalam hubungan dengan komunitas lain.

Dengan tindakan ini, Madjid mendorong umat Islam untuk mengamati dan menerima keberagaman budaya dan ide-ide yang ada di dunia. Ia percaya bahwa inklusivisme bukan hanya memperkaya pemahaman keagamaan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan mengurangi ketegangan antar kelompok. Melalui pemikirannya, Madjid telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk wacana Islam yang lebih toleran dan relevan dengan dinamika global, menjadikannya figur kunci dalam sejarah intelektual Indonesia.

Pemikiran Madjid tentang kosmopolitanisme Islam mengusung pendekatan yang lebih terbuka dan reseptif terhadap budaya-budaya lain dan ide-ide yang berbeda (Mu'ti et al., 2016). Dengan mengusulkan pendekatan inklusivisme, Madjid mengajak umat Islam untuk lebih memahami dan menerima keberagaman budaya serta pemikiran dalam konteks Islam (Bahaf, 2008). Dalam hal ini, Madjid tidak hanya menawarkan pandangan yang lebih inklusif terhadap Islam, tetapi juga membuka jalan bagi dialog antar-agama dan interaksi budaya yang lebih baik.

Dengan mengambil pendekatan inklusivisme, Madjid menciptakan landasan untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang Islam yang mempertimbangkan konteks budaya dan zaman yang berbeda. Melalui pemikirannya, Madjid berupaya membuka pintu bagi pengembangan pemikiran Islam yang relevan dengan tantangan-tantangan kontemporer dan menghadirkan kontribusi yang positif bagi masyarakat global yang semakin terhubung.

Relevansi Konsep Kosmopolitanisme Islam dalam Era Globalisasi

Konsep kosmopolitanisme Islam sangat relevan dalam era globalisasi, yang ditandai oleh integrasi ekonomi, sosial, dan budaya antarnegara (Sujati, 2018). Dalam era ini, dunia semakin terhubung dan interaksi antar bangsa serta budaya menjadi semakin intens. Kosmopolitanisme Islam menawarkan kerangka kerja yang inklusif dan toleran untuk mengelola keragaman agama, budaya, dan identitas dalam masyarakat global. Kerangka ini memungkinkan umat Islam untuk berinteraksi secara positif dengan berbagai kelompok, sembari tetap mempertahankan identitas keagamaan mereka.

Nur Cholish Madjid adalah salah satu pemikir Muslim kontemporer yang paling menonjol dalam mendukung pandangan kosmopolitanisme Islam. Dikenal sebagai seorang intelektual progresif, Madjid menyuarakan berbagai konsep dan nilai yang sejalan dengan ide ini (Muslim, 2021). Ia percaya bahwa Islam tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga memiliki nilai-nilai universal yang dapat diaplikasikan dalam konteks global. Dalam pandangannya, Islam mengajarkan keterbukaan, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman, yang semuanya sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi (Anggraini, 2022).

Madjid menekankan bahwa umat Islam harus mengadopsi sikap inklusif dalam menghadapi keragaman budaya dan agama (Saihu, 2021). Menurutnya, inklusivisme adalah cara yang efektif untuk menciptakan harmoni dan kedamaian dalam masyarakat yang semakin plural. Ia mendorong umat Islam untuk terlibat dalam dialog antaragama dan kerja sama lintas budaya, guna membangun pemahaman dan saling menghormati. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman keagamaan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam.

Selain itu, Madjid menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk mempromosikan kosmopolitanisme Islam (Hasyim, 2023). Ia percaya bahwa dengan meningkatkan literasi dan pemahaman tentang nilai-nilai universal Islam, umat Islam dapat lebih siap menghadapi dinamika globalisasi. Pendidikan yang baik akan membuka wawasan umat Islam tentang dunia luar dan mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam membangun peradaban global yang lebih adil dan damai.

Kontribusi pemikiran Madjid terhadap konsep kosmopolitanisme Islam mencerminkan upaya serius untuk menyeimbangkan antara mempertahankan identitas keagamaan dan berpartisipasi dalam masyarakat global. Pemikirannya

memberikan landasan bagi umat Islam untuk menjadi bagian integral dari komunitas global tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keislaman mereka. Dengan demikian, Madjid tidak hanya memperkaya wacana intelektual Islam, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam di era globalisasi.Pertama, Madjid menekankan toleransi dan pluralisme sebagai bagian integral dari ajaran Islam (Hanik, 2014). Dia mengadvokasi untuk pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman keyakinan dan praktek agama, sejalan dengan konsep Ahli Kitab dalam Islam yang mengakui hak-hak individu dari berbagai agama untuk menjalankan keyakinan mereka.

Selanjutnya, Madjid secara konsisten menentang ekstremisme dan fanatisme dalam agama, termasuk dalam Islam (Hanafi, 2018). Dia mendorong umat Islam untuk mengadopsi sikap terbuka dan inklusif terhadap orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda, sesuai dengan nilai-nilai kosmopolitanisme Islam yang menekankan inklusivitas dan toleransi terhadap keberagaman agama.

Pendidikan dan dialog antaragama juga menjadi fokus perhatian Madjid (Nasri, 2024). Dia menganggap pendidikan dan dialog antaragama sebagai sarana penting untuk membangun pemahaman dan perdamaian antar-umat beragama. Konsep kosmopolitanisme Islam mendukung upaya Madjid untuk mempromosikan dialog antaragama dan pendidikan lintasagama sebagai cara untuk memperkuat toleransi dan saling pengertian antaragama.

Selain itu, Madjid mendorong umat Islam untuk terlibat dalam solidaritas global dan advokasi untuk keadilan sosial. Ia menekankan bahwa tanggung jawab sosial dan kemanusiaan merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam yang harus diterapkan di panggung global. Dalam pandangannya, umat Islam harus menjadi agen perubahan yang aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia, mengurangi kesenjangan sosial, dan membela mereka yang tertindas, tanpa memandang perbedaan agama atau kebangsaan.

Konsep kemanusiaan universal dalam kosmopolitanisme Islam memperkuat pandangan Madjid tentang tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh setiap Muslim. Ia percaya bahwa nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan kesejahteraan universal harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang berdampak positif pada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat Islam didorong untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Pandangan Madjid ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal tetapi juga memiliki implikasi luas dalam kancah internasional. Dengan menekankan pentingnya solidaritas global dan advokasi keadilan sosial, Madjid mengajak umat Islam untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas global yang lebih besar (Nagri et al., 2020). Ini sejalan dengan prinsip kosmopolitanisme Islam yang mendorong keterbukaan, inklusivisme, dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Dengan demikian, pemikiran Madjid memberikan landasan moral dan etis bagi umat Islam untuk berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan harmonis. Dengan demikian, pemikiran Nur Cholish Madjid memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep kosmopolitanisme Islam, terutama dalam hal toleransi, pluralisme, dialog antaragama, solidaritas global, dan keadilan sosial. Keduanya berusaha untuk mempromosikan pandangan Islam yang inklusif, progresif, dan responsif terhadap realitas global yang semakin terhubung dan kompleks. Melalui pemikiran dan aksi yang sejalan, konsep kosmopolitanisme Islam dan pandangan Madjid dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman modern yang semakin kompleks dan terhubung secara global.

Implikasi bagi Kebijakan Keagamaan Kontemporer

Gagasan kosmopolitanisme Islam yang diperkenalkan oleh Nurcholish Madjid membawa implikasi yang mendalam bagi pembentukan kebijakan keagamaan dalam konteks era globalisasi saat ini. Salah satu implikasi utamanya adalah pentingnya mempromosikan toleransi dan pluralisme agama dalam masyarakat. Dalam pandangan Madjid, kebijakan keagamaan harus mengakui dan menghormati keberagaman keyakinan, yang dapat diwujudkan melalui langkah-langkah seperti dialog antaragama, pengembangan kurikulum pendidikan agama yang inklusif, dan perlindungan hukum terhadap minoritas agama (Hendry, 2024).

Untuk mewujudkan pandangan ini, Madjid mengusulkan beberapa langkah konkret, seperti dialog antaragama yang intensif dan berkelanjutan. Dialog ini tidak hanya bertujuan untuk memahami perbedaan, tetapi juga untuk menemukan nilai-nilai bersama yang dapat memperkuat ikatan sosial. Selain itu, pengembangan kurikulum pendidikan agama yang inklusif juga merupakan langkah penting. Kurikulum semacam ini akan mengajarkan siswa tentang pentingnya toleransi, menghargai perbedaan, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang agama-agama lain.

Perlindungan hukum terhadap minoritas agama juga merupakan aspek krusial dalam pandangan Madjid. Ia menekankan bahwa kebijakan keagamaan harus memastikan bahwa hak-hak minoritas dilindungi secara adil dan setara (Monib & Bahrawi, 2011). Ini termasuk perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan tidak adil. Dengan demikian, kebijakan keagamaan yang inklusif dan toleran tidak hanya akan memperkuat persatuan nasional tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip kosmopolitanisme Islam yang diajarkan oleh Madjid.

Nurcholish Madjid juga sangat menekankan penolakan terhadap ekstremisme dan fanatisme dalam agama (Madjid, 2019). Menurutnya, kebijakan keagamaan harus secara aktif menangani masalah radikalisasi dengan mengutamakan pemahaman yang benar tentang ajaran agama. Hal ini bisa dicapai dengan memberikan pendidikan agama yang komprehensif dan mendalam, yang mengajarkan esensi ajaran agama yang penuh dengan nilainilai perdamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat akan lebih mampu membedakan antara ajaran agama yang sejati dan interpretasi yang menyimpang.

Selain itu, Madjid menekankan pentingnya pengembangan pemikiran kritis di kalangan umat Islam sebagai cara untuk mencegah radikalisasi. Pemikiran kritis memungkinkan individu untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai ide dan pandangan dengan cara yang rasional dan terbuka. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peran kunci dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, yang pada gilirannya akan membuat masyarakat lebih tahan terhadap ideologi ekstremis. Dengan demikian, kebijakan keagamaan harus mendukung program-program yang mendorong diskusi terbuka dan analisis kritis tentang ajaran-ajaran agama.

Madjid juga mengusulkan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi penting untuk menolak narasi ekstremis. Ini melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi dan melawan ideologi radikal melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi. Pemberdayaan ini juga mencakup upaya untuk membangun komunitas yang kuat dan inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam menjaga harmoni sosial. Kebijakan keagamaan yang efektif harus mencakup inisiatif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan ekstremisme.

Keseluruhan pendekatan Madjid terhadap penolakan ekstremisme dan fanatisme menekankan perlunya tindakan holistik dan proaktif. Dengan mengintegrasikan pendidikan agama yang benar, pengembangan pemikiran kritis, dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan keagamaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai moderasi dan toleransi. Ini tidak hanya akan membantu mengatasi ancaman radikalisasi, tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang damai dan harmonis, sejalan dengan prinsipprinsip kosmopolitanisme Islam yang diadvokasi oleh Madjid. Pendidikan dan dialog antaragama juga menjadi fokus dalam pemikiran Madjid (Madjid, 1992). Oleh karena itu, kebijakan keagamaan harus mendukung programprogram pendidikan yang mempromosikan toleransi, saling penghargaan, dan pemahaman antaragama. Selain itu, pentingnya memfasilitasi dialog antaragama yang konstruktif untuk memecahkan konflik dan mempromosikan kerjasama lintas-agama menjadi kunci dalam menghadapi dinamika masyarakat yang beragam.

Gagasan Nurcholish Madjid tentang kosmopolitanisme Islam menekankan pentingnya solidaritas global dan advokasi untuk keadilan sosial (Madjid, 1994). Menurutnya, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan isuisu kemanusiaan yang melampaui batas agama dan budaya. Hal ini mencakup dukungan terhadap berbagai program yang bertujuan mengatasi kemiskinan, memperjuangkan hak asasi manusia, dan mendorong penyelesaian konflik secara berkelanjutan. Solidaritas global ini adalah bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan kasih sayang dan keadilan bagi semua umat manusia.

Madjid berpendapat bahwa kebijakan keagamaan harus proaktif dalam mendukung program-program pembangunan sosial yang dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk mendukung inisiatif pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas yang terpinggirkan. Dengan terlibat dalam upaya-upaya ini, umat Islam dapat berkontribusi secara nyata dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, yang merupakan salah satu prinsip dasar keadilan dalam Islam.

Lebih jauh, Madjid menekankan bahwa kebijakan keagamaan harus memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu. Ini berarti menegakkan hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan berpendapat. Umat Islam didorong untuk menjadi pelopor dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, baik dalam

komunitas mereka sendiri maupun ditingkat global. Dengan demikian, Islam dapat berperan sebagai kekuatan positif yang mendorong penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial.

Selain itu, Madjid menggarisbawahi pentingnya keterlibatan umat Islam dalam penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Kebijakan keagamaan harus mendukung upaya-upaya diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan perselisihan secara damai (Abu-Nimer, 2010). Ini mencakup mediasi, rekonsiliasi, dan inisiatif lain yang bertujuan mengurangi ketegangan dan membangun perdamaian. Dengan mendorong penyelesaian konflik yang berkelanjutan, umat Islam dapat berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih harmonis dan stabil, sesuai dengan nilai-nilai kosmopolitanisme Islam yang diadvokasi oleh Madjid.

Terakhir, Nurcholish Madjid menekankan perlunya reformasi dalam institusi keagamaan, menunjukkan bahwa kebijakan keagamaan harus mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam institusi tersebut (Madjid, 1992b). Madjid percaya bahwa reformasi ini penting untuk memastikan bahwa institusi keagamaan dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi seluruh umat Islam, serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kemajuan masyarakat.

Salah satu aspek utama dari reformasi institusi keagamaan yang ditekankan oleh Madjid adalah peningkatan transparansi. Institusi keagamaan harus menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan informasi dan mengambil keputusan agar dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat. Ini melibatkan publikasi anggaran, kegiatan, dan keputusan-keputusan penting, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi kinerja institusi keagamaan dengan lebih baik.

Selain itu, akuntabilitas merupakan prinsip kunci yang harus diterapkan dalam reformasi institusi keagamaan. Institusi-institusi ini harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta siap menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Dengan meningkatkan mekanisme akuntabilitas, seperti audit independen dan evaluasi kinerja rutin, institusi keagamaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka dalam melayani kepentingan umat Islam.

Madjid juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam institusi keagamaan. Ini berarti institusi-institusi tersebut harus membuka diri untuk melibatkan berbagai kelompok dan pandangan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Dengan mendengarkan suara-suara yang beragam, institusi keagamaan dapat lebih memahami dan mewakili kebutuhan serta aspirasi seluruh umat Islam, sehingga dapat lebih efektif dalam memenuhi peran mereka sebagai pemimpin spiritual dan sosial.

Pada kesimpulannya, Madjid memandang reformasi institusi keagamaan sebagai langkah krusial dalam membangun masyarakat yang inklusif, transparan, dan akuntabel (Mukhlis & Mustofa, 2020). Reformasi ini memungkinkan institusi keagamaan untuk lebih baik menyesuaikan diri dengan dinamika zaman dan tantangan sosial, serta memberikan kontribusi yang lebih besar pada pembangunan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan harmonis. Dengan demikian, kebijakan keagamaan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip reformasi ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan implikasi-imipikasi ini, kebijakan keagamaan kontemporer dapat dirancang untuk mempromosikan nilai-nilai kosmopolitanisme Islam yang inklusif, toleran, dan berorientasi pada kemanusiaan. Ini akan membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan berkeadilan di tengah era globalisasi yang semakin kompleks dan terhubung.

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Konsep Kosmopolitanisme Islam

Konsep kosmopolitanisme Islam, sebagaimana yang digagas oleh Nurcholish Madjid, menawarkan kerangka kerja yang inklusif dan toleran untuk mengelola keragaman agama, budaya, dan identitas dalam masyarakat yang semakin terhubung di era globalisasi. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan yang perlu dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Resistensi dan Ketidakpahaman

Salah satu tantangan utama dalam implementasi konsep kosmopolitanisme Islam adalah resistensi yang berasal dari beberapa kelompok yang mempertahankan pandangan yang sempit atau eksklusif terhadap agama dan budaya. Kelompok-kelompok ini mungkin khawatir bahwa penerimaan terhadap prinsip-prinsip inklusifitas dan toleransi akan mengancam identitas dan keberadaan mereka. Mereka mungkin melihat kosmopolitanisme Islam

sebagai ancaman terhadap tradisi-tradisi keagamaan dan budaya yang telah mereka anut selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mereka cenderung menolak atau bahkan melawan upaya-upaya yang bertujuan untuk memperluas pemahaman agama dan membuka diri terhadap keberagaman.

Ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip inklusifitas dan toleransi juga menjadi penghambat dalam menerima konsep kosmopolitanisme Islam. Beberapa individu mungkin belum sepenuhnya memahami arti dari inklusivisme dalam konteks Islam, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakpahaman ini dapat mengakibatkan persepsi yang salah atau stereotip terhadap konsep kosmopolitanisme Islam, sehingga membuat orang enggan untuk menerapkannya atau bahkan menentangnya.

Selain itu, resistensi terhadap kosmopolitanisme Islam juga bisa dipicu oleh ketakutan akan perubahan atau ketidakpastian yang mungkin timbul akibat penerimaan terhadap prinsip-prinsip inklusifitas dan toleransi. Beberapa individu mungkin merasa nyaman dengan status quo dan tidak ingin mengubah cara pandang atau perilaku mereka. Mereka mungkin khawatir bahwa penerimaan terhadap konsep kosmopolitanisme Islam akan mengganggu keseimbangan sosial atau bahkan mengancam posisi mereka dalam masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan. Pendidikan yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip inklusifitas dan toleransi dalam Islam perlu diperkuat, baik di tingkat pendidikan formal maupun informal. Selain itu, dialog antaragama dan antarbudaya juga penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan mengatasi ketidakpahaman. Langkah-langkah ini harus didukung oleh upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menerima dan menghargai keberagaman. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, resistensi dan ketidakpahaman terhadap konsep kosmopolitanisme Islam dapat diatasi, dan masyarakat dapat bergerak menuju ke arah yang lebih inklusif dan toleran.

2. Konflik dan Ketegangan Antaragama

Konflik dan ketegangan antaragama seringkali menjadi tantangan serius dalam implementasi kosmopolitanisme Islam, terutama di masyarakat yang heterogen. Kehadiran beragam keyakinan dan praktik keagamaan dapat menciptakan gesekan dan ketidakpahaman antarumat beragama, yang pada

gilirannya dapat memperburuk situasi sosial dan menghambat upaya untuk mempromosikan inklusivitas dan toleransi. Konflik semacam ini dapat timbul dari ketidakpercayaan, ketidaktahuan, atau bahkan pemahaman yang salah tentang agama-agama lain, dan bisa diperparah oleh isu-isu politik, ekonomi, atau sosial.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang cermat dalam membangun dialog dan kerjasama antarumat beragama. Dialog antaragama yang terbuka dan jujur dapat menjadi sarana penting untuk mempromosikan pemahaman bersama, saling menghormati, dan mencari solusi atas perbedaan yang muncul. Melalui dialog ini, para pemimpin agama dan komunitas keagamaan dapat berkolaborasi untuk mengidentifikasi titik-titik persamaan, memahami perbedaan, dan menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis.

Selain itu, penting untuk membangun mekanisme rekonsiliasi yang efektif untuk menangani konflik dan ketegangan antaragama yang mungkin timbul. Ini bisa melibatkan pembentukan forum rekonsiliasi atau komisi kebenaran, yang bertujuan untuk mendengarkan dan memahami berbagai perspektif, menyelesaikan ketidaksetujuan, dan memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik. Dalam konteks kosmopolitanisme Islam, pendekatan rekonsiliasi ini harus didasarkan pada nilai-nilai toleransi, keadilan, dan perdamaian yang diajarkan oleh agama-agama yang berbeda.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan terus-menerus dalam membangun dialog dan kerjasama antarumat beragama, masyarakat yang heterogen dapat mengatasi konflik dan ketegangan antaragama, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Ini akan memungkinkan implementasi kosmopolitanisme Islam yang lebih efektif, di mana nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan keberagaman dihargai dan dipromosikan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Ekstremisme dan Radikalisasi

Ekstremisme dan radikalisasi dalam konteks agama merupakan tantangan serius bagi implementasi kosmopolitanisme Islam. Pemikiran ekstremis cenderung menekankan pada penafsiran sempit dan eksklusif terhadap ajaran agama, yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai inklusif dan toleran yang dianut dalam konsep kosmopolitanisme Islam. Radikalisasi juga dapat menghasilkan sikap intoleran dan kekerasan terhadap individu atau kelompok

yang dianggap berbeda, yang merusak harmoni dan keberagaman dalam masyarakat.

Upaya untuk menangani dan mencegah penyebaran pemikiran radikal perlu diintensifkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu. Hal ini mencakup pendekatan yang holistik, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keagamaan, masyarakat sipil, dan individu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisasi. Langkahlangkah konkret bisa meliputi program-program pendidikan dan kesadaran yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, dialog antaragama, pemahaman yang benar tentang ajaran agama, serta kemampuan kritis untuk menafsirkan informasi dan memahami perspektif yang beragam.

Selain itu, penting untuk memberikan alternatif yang positif bagi individu yang rentan terhadap radikalisasi. Ini bisa berupa pemberdayaan ekonomi, pendidikan yang berkualitas, akses terhadap kesempatan sosial, dan pembangunan komunitas yang inklusif. Dengan memberikan kesempatan dan dukungan yang memadai, individu cenderung lebih mungkin untuk mengadopsi sikap yang moderat dan menerima nilai-nilai kosmopolitanisme Islam yang mempromosikan inklusivitas, perdamaian, dan keadilan.

Dengan demikian, upaya bersama dalam menangani ekstremisme dan radikalisasi dalam konteks agama adalah kunci dalam mendukung implementasi kosmopolitanisme Islam. Melalui pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan harmonis bagi semua individu, di mana nilai-nilai kosmopolitanisme Islam dapat dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain dihadapkan pada berbagai tantangan, implementasi konsep kosmopolitanisme Islam juga menawarkan peluang yang signifikan bagi masyarakat yang beragam dan inklusif. Konsep ini memperkuat panggilan untuk saling menghormati, toleransi, dan kerjasama antarumat beragama, serta mendorong pembangunan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dalam konteks ini, peluang-peluang tersebut memungkinkan terwujudnya lingkungan sosial yang lebih dinamis, aman, dan berkeadilan bagi semua individu. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang ini, masyarakat dapat memperkuat fondasi kosmopolitanisme Islam dan meningkatkan kualitas hidup bersama, sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Peluang besar terletak pada pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kosmopolitanisme

Islam. Dengan memperkuat pendidikan agama yang inklusif dan mengedepankan nilai-nilai toleransi, pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan dan memperdalam pemahaman tentang kosmopolitanisme Islam.

- 2. Pemberdayaan Peran Masyarakat Sipil: Melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen pada prinsip-prinsip kosmopolitanisme Islam, pemerintah dapat memanfaatkan kekuatan masyarakat dalam memperluas jangkauan dan mendukung implementasi konsep ini dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- 3. Diplomasi dan Kerjasama Internasional: Dalam konteks globalisasi, kerjasama internasional dan diplomasi antarnegara juga menjadi peluang besar dalam mempromosikan kosmopolitanisme Islam. Dengan membangun jaringan kerjasama yang kuat antara negara-negara dengan berbagai latar belakang budaya dan agama, konsep ini dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif.

Dengan mengidentifikasi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, implementasi konsep kosmopolitanisme Islam dapat menjadi kenyataan yang memberikan kontribusi positif bagi terciptanya masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan di era globalisasi ini.

Refleksi dan Rekomendasi untuk Masa Depan

Refleksi terhadap konsep kosmopolitanisme Islam yang diilhami oleh pemikiran Nurcholish Madjid mengungkapkan betapa pentingnya nilai inklusivitas dan toleransi dalam menghadapi era globalisasi yang semakin terkoneksi. Dalam konteks ini, konsep yang diperkenalkan oleh Madjid menawarkan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat global yang lebih harmonis dan saling menghormati, di mana keberagaman agama, budaya, dan identitas dapat diakui dan dihargai. Namun, dalam mengimplementasikan konsep ini, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa kelompok atau individu mungkin menolak ide kosmopolitanisme Islam karena menganggapnya bertentangan dengan keyakinan atau nilai tradisional mereka. Selain itu, konflik antaragama dan radikalisasi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan visi inklusif ini. Bagaimanapun, refleksi atas konsep ini juga membawa harapan dan peluang bagi masa depan.

Peluang yang terbuka adalah kemungkinan memperluas pengaruh kosmopolitanisme Islam melalui kerjasama antarlembaga keagamaan,

organisasi masyarakat sipil, dan negara-negara. Dengan kolaborasi yang kokoh, nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan dialog antaragama dapat lebih mudah diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik sehari-hari. Rekomendasi untuk masa depan juga menjadi bagian penting dari refleksi ini.

Rekomendasi tersebut termasuk penguatan pendidikan agama yang inklusif, di mana nilai-nilai kosmopolitanisme Islam ditanamkan secara lebih dalam kepada generasi muda. Pengembangan dialog antaragama juga menjadi kunci penting dalam membangun pemahaman dan kerjasama lintas-agama. Selain itu, pemberdayaan masyarakat sipil untuk mempromosikan inklusivitas dan toleransi dapat menjadi langkah yang efektif. Dukungan pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam mendorong kebijakan inklusif yang memajukan nilai-nilai kosmopolitanisme Islam.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi kosmopolitanisme Islam dapat memperkuat inklusivitas, harmoni, dan keberlanjutan dalam masyarakat global yang semakin beragam. Meskipun tantangan-tantangan tetap ada, refleksi dan rekomendasi ini menjadi pijakan untuk mencapai visi yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi masa depan umat manusia.

REKOMENDASI

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan berdasarkan kesimpulan dari pemahaman tentang kosmopolitanisme Islam yang diilhami oleh pemikiran Nurcholish Madjid:

- 1. Penguatan Kurikulum Pendidikan Agama: Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperkuat kurikulum pendidikan agama dengan memasukkan konsep kosmopolitanisme Islam sebagai bagian integral dari pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan materi yang mendalam tentang toleransi, pluralisme, dialog antaragama, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam. Langkah ini akan membantu generasi muda memahami dan menginternalisasi prinsipprinsip inklusif dalam agama mereka.
- 2. Pembentukan Forum Antaragama: Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama dalam membentuk forum antaragama yang bertujuan untuk mempromosikan dialog, saling pengertian, dan kerjasama lintas-agama. Forum semacam ini dapat menjadi wadah bagi pemimpin agama, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk berbagi

- pemikiran, menyelesaikan konflik, dan merencanakan inisiatif bersama untuk memajukan perdamaian dan harmoni antaragama.
- 3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Program pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat diselenggarakan untuk mempersiapkan para pemimpin agama, pendidik, dan aktivis masyarakat dalam mempromosikan kosmopolitanisme Islam. Pelatihan tersebut dapat mencakup keterampilan dialog antaragama, manajemen konflik, dan advokasi untuk kebijakan inklusif. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, para pemangku kepentingan akan lebih efektif dalam mendorong perubahan positif dalam masyarakat.
- 4. Integrasi Nilai-Nilai Kosmopolitanisme dalam Kebijakan Keagamaan: Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan nilainilai kosmopolitanisme Islam dalam kebijakan keagamaan yang ada.
 Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun pedoman dan regulasi yang mendukung praktik-praktik inklusif, melindungi hak-hak minoritas agama, dan mendorong kerjasama antaragama. Dengan demikian, kebijakan keagamaan akan lebih selaras dengan prinsip-prinsip kosmopolitanisme Islam.
- 5. Penguatan Jaringan Antarlembaga: Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan dan penguatan jaringan antarlembaga yang terlibat dalam promosi kosmopolitanisme Islam. Ini mencakup kerjasama antara lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah dalam menyusun strategi bersama dan mengimplementasikan program-program inklusif. Dengan bekerja sama, lembaga-lembaga ini dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam mempromosikan nilai-nilai kosmopolitanisme Islam.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan akan terjadi perubahan yang positif dalam praktik keagamaan dan kebijakan yang lebih inklusif dan harmonis di era globalisasi saat ini. Langkah-langkah ini akan membantu mewujudkan visi Nurcholish Madjid tentang masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan berkelanjutan di tengah keragaman yang semakin kompleks.

PENUTUP

Dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai oleh integrasi ekonomi, sosial, dan budaya antarnegara, konsep kosmopolitanisme Islam yang diperkenalkan Nurcholish Madjid memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan keagamaan. Melalui konsep ini, Madjid menegaskan pentingnya inklusivitas, toleransi, dan kerja sama lintas-budaya sebagai landasan utama bagi hubungan antarumat beragama. Implikasi pertama yang dapat ditarik adalah perlunya memperkuat dialog antaragama sebagai sarana untuk mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman agama dan budaya. Dengan memfasilitasi dialog yang konstruktif, kebijakan keagamaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung toleransi dan saling penghormatan di tengah masyarakat yang semakin terhubung secara global.

Selanjutnya, konsep kosmopolitanisme Islam juga menekankan pentingnya penolakan terhadap ekstremisme agama dan fanatisme. Hal ini menimbulkan implikasi bagi kebijakan keagamaan untuk mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam mencegah dan menangani radikalisasi agama. Langkah-langkah seperti penyuluhan, pembentukan jejaring antaragama untuk pencegahan konflik, dan penguatan regulasi terhadap organisasi atau kelompok yang menganut paham ekstrem dapat menjadi bagian dari strategi kebijakan yang efektif.

Selain itu, konsep kosmopolitanisme Islam juga menyoroti pentingnya nilainilai kemanusiaan universal dalam menjawab tantangan global. Implikasinya adalah perlunya kebijakan keagamaan yang tidak hanya memperhatikan kepentingan umat agama tertentu, tetapi juga mempromosikan solidaritas global dalam mengatasi masalah bersama seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, dan ketidakadilan sosial. Dengan memperkuat kerja sama antaragama dan kerjasama lintas-budaya, kebijakan keagamaan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan perdamaian dan keadilan di era globalisasi.

Pada konteks ini, rekomendasi untuk kebijakan keagamaan di masa depan adalah memperkuat upaya dialog antaragama, meningkatkan pendidikan agama yang inklusif, serta menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisasi. Selain itu, perlunya pembentukan kebijakan yang progresif dan adaptif dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin kompleks juga menjadi hal yang krusial. Dengan demikian, kosmopolitanisme Islam bukan hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga menjadi panduan yang berharga dalam merumuskan kebijakan keagamaan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan di era globalisasi.

REFERENSI

- Abu-Nimer, M. (2010). *Nirkekerasan dan bina damai dalam Islam: Teori dan praktik*. Pustaka Alvabet.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Anggraini, R. D. (2022). Analisis konsep sekularisasi ditinjau dari perspektif Nurcholish Madjid. *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*, 147.
- Assyaukanie, L., SJ, F. M.-S., Widjanarko, P., Heriyanto, H., Kertamuda, F. E., Ibrahim, A., Hairunnisa, S., Al Akbar, N., Risza, H., & Wahyuti, T. (2024). *Kontekstualisasi pemikiran Cak Nur di tengah transformasi Indonesia kini*. PT Rekacipta Proxy Media.
- Bahaf, M. A. (2008). Benih pluralisme di Indonesia: Kritik terhadap pemikiran teologi agama-agama Nurcholish Madjid.
- Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Authoritarianism, democracy, Islamic movements and contestations of Islamic religious ideas in Indonesia. *Religions*, 12(8), 641.
- Dewi, E. (2018). Islam liberal di Indonesia (pemikiran dan pengaruhnya dalam pemikiran politik Islam di Indonesia). *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 18–32.
- Fihrisi, F. (2014). Konsep Islam liberal Nurcholish Madjid dan implikasinya terhadap pendidikan Islam di Indonesia [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Hanafi, I. (2018). Agama dalam bayang-bayang fanatisme; Sebuah upaya mengelola konflik agama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 48–67.
- Hanik, U. (2014). Pluralisme agama di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1).
- Hasyim, A. (2023). Modernisasi pendidikan Islam perspektif Nurcholish Madjid. *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 76–86.
- Hendry, H. (2024). Mewujudkan keadilan beragama di tengah pluralitas agama di Indonesia dalam bingkai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 6520–6535.

- Hermawanto, A., & Anggraini, M. (2020). *Globalisasi, revolusi digital dan lokalitas: Dinamika internasional dan domestik di era borderless world.* LPPM Press UPN «Veteran» Yogyakarta.
- Hidayatullah, W., Setiawan, D., Syafe'i, I., & Muntoha, T. (2022). Pemikiran neo-modernisme perspektif KH. Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid serta implikasinya terhadap pendidikan Islam multikultural. *Al-Haytham: Jurnal Pendidikan Islam*, 62–78.
- Kersten, C. (2009). Islam, cultural hybridity and cosmopolitanism: New Muslim intellectuals on globalization. *Journal of International and Global Studies*, 1(1), 5.
- Madjid, N. (1992a). *Islam: Doktrin dan peradaban*. Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta.
- Madjid, N. (1992b). *Islam: Doktrin dan peradaban*. Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta.
- Majid, N. (2008). Islam, kemodernan, dan keindonesiaan. Mizan Pustaka.
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammedi, M. (2017). Pemikiran sosial dan keislaman Nurcholish Madjid (CAK NUR). *Jurnal Tarbiyah*, 24(2).
- Mukhlis, M., & Mustofa, I. (2020). *Kolaborasi penanggulangan radikalisme berbasis pondok pesantren*. IDEA Press Yogyakarta.
- Muslim, A. (2021). Nurcholis Madjid dan politik Muslim. IRCiSoD.
- Mu'ti, A., Ulhaq, F. R., Khoirudin, A., & Fanani, A. F. (2016). Kosmopolitanisme Islam berkemajuan: Catatan kritis Muktamar Teladan Ke-47.
- Nagri, K. S., Muqawim, R., Munastiwi, E., & Santika, R. (2020). Menggali prinsip dasar guru penggerak melalui rekonstruksi pemikiran Nurcholish Madjid. *Syntax*, 2(9), 583.
- Nasri, U. (2024). Rethinking religious moderation: Revitalisasi konsep manusia perspektif filsafat pendidikan Islam dalam konteks multikultural. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 213–220.
- Nurcholis, M. (1995). Islam agama peradaban: Membangun makna dan relevansi doktrin Islam dan sejarah. Universitas Paramadina.
- Putri, A. R. (2019). Perspektif Nurcholish Madjid tentang penguatan dakwah Islam di Indonesia. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1), 51–66.
- Qomar, M. (2021). Moderasi Islam Indonesia. IRCiSoD.

- Ridwan, A. H. (2020). Fiqh pluralism: Comprehensive analysis of Nurkholish Madjid ideas regarding hermeneutics. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(1).
- Rofiah, C. (2022). Analisis data kualitatif: Manual atau dengan aplikasi? *Develop*, 6(1), 33-46.
- Saihu, M. (2021). Pendidikan moderasi beragama: Kajian Islam Wasathiyah menurut Nurcholish Madjid. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 16–34.
- Suparjo, S., Mohammad, H., Dimas, I. S., Arif, E., & Hanan, F. G. (2022). Potret religiusitas dan toleransi beragama di kalangan pelajar SMA.
- Wijaya, A. (2019). Kontestasi merebut kebenaran Islam di Indonesia. IRCiSoD.